



**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN
(Studi Kasus Kecamatan Halong)**

Anggi Rahmadayanti¹, Agus Surya Dharma², Gusti Muhammad Hidayatullah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: Anggirahmadayanti8@gmail.com

ABSTRAK

KIA merupakan salah satu perwujudan sebagai tanda bukti kependudukan untuk anak di bawah 17 Tahun dengan namun masih banyak anak-anak dari Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yang belum memiliki, permasalahannya adalah fasilitas yang masih kurang memadai dalam bidang KIA, kurangnya sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat, dan tingkat pemahaman masyarakat masih rendah dikarenakan informasi yang masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait pelaksanaan KIA khususnya di Kecamatan Halong dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deksriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian cukup terimplementasi. Pertama, indikator transmisi belum sesuai karena tidak adanya sosialisasi. Kedua, indikator kejelasan belum sesuai karena masyarakat belum memahami dengan jelas manfaat dan persyaratananya. Ketiga, indikator konsisten belum sesuai karena sosialisasi yang diberikan belum konsisten. Keempat, staf sudah sesuai karena sudah cukup, memadai dan berkompeten. Kelima, indikator informasi tidak sesuai karena tidak tersampaikan ke semua masyarakat. Keenam, indikator wewenang sudah sesuai karena sudah diberikan wewenang penuh. Ketujuh, indikator fasilitas belum sesuai karena belum cukup dan memadai. Kedelapan, indikator sikap para pelaksana sudah sesuai karena sudah didukung dan diterima. Kesembilan, indikator insentif tidak sesuai karena pelayanan dilakukan secara gratis. Kesepuluh, indikator koordinasi antar pelaksana sudah sesuai karena sebagian masyarakat mengetahui KIA melalui pihak ke 3 (tiga). Kesebelas, indikator SOP sudah sesuai karena petugas sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP. Disarankan kepada Kepala Dinas terkait agar meningkatkan kerjasama dengan stakeholder. Kepada pegawai perlu adanya peningkatan sosialisasi tentang Program KIA agar Masyarakat lebih paham.

Kata Kunci : Implementasi, KIA, Kecamatan

ABSTRACT

KIA is one of the manifestations as proof of population for children under 17 years old, but there are still many children from Halong District, Balangan Regency who do not have it the problem is that the facilities are still inadequate in the field of KIA, lack of socialization delivered to the community, and the level of public understanding is still low due to the lack of information. This study aims to find out more about the implementation of KIA, especially in Halong District and the factors that influence it. This research method uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. The results of the study are quite implemented. First, the transmission indicator is not appropriate because there is no socialization. Second, the clarity indicator is not appropriate because the community does not clearly understand the benefits and requirements. Third, the consistency indicator is not appropriate because the socialization given is not consistent. Fourth, the staff is appropriate because it is sufficient, adequate and competent. Fifth the information indicators are not appropriate because they are not conveyed to all members of society. Sixth, the authority indicator is appropriate because it has been given full authority. Seventh, the indicators of facilities are not appropriate because they are not enough and adequate. Eighth, the attitude indicator of the implementers is appropriate because it has been supported and accepted. Ninth, the incentive indicator is not appropriate because the service is provided free of charge. Tenth, the coordination indicator between implementers is appropriate because some people know about KIA through a third party. Eleventh, the SOP indicator is appropriate because officers have carried out their duties in accordance with the SOP. It is recommended that the Head of the Population and Civil Registration Service of Balangan Regency improve cooperation with stakeholders. Employees need to increase socialization about the KIA Program so that the community understands better.

Keywords: Implementation, KIA, Sub-district



PENDAHULUAN

Dilaksanakannya tertib administrasi terutama kependudukan seperti KTP, Kartu keluarga, Akta Kelahiran hingga KIA merupakan usaha dari pemerintah untuk lebih bisa mensejahterakan maupun melindungi dan juga memantau setiap penduduk Indonesia. Adapun KIA diharapkan agar anak-anak yang dibawah umur 17 tahun juga tidak lupa dari perhatian dan pantauan pemerintah.

Menurut Rizqiya Anindia (2023:3) KIA atau yang dimaksud dengan kartu identitas anak adalah menjadi bahan bukti bagi seorang anak yang kurang dari 17 atau bagi anak yang belum menikah yang mana kartu ini diterbitkan oleh dinas kabupaten atau Kota, KIA ini fungsinya sama dengan KTP sebagai tanda penduduk atau pengenal bagi seseorang yang sah di mata negara Indonesia.

Banyak sekali fungsi dari KIA mulai dari memberikan perlindungan hingga pemenuhan hak identitas bagi anak sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, KIA ini bisa digunakan untuk mengurus BPJS, atau membuka rekening tabungan di Bank, sebagai syarat mendaftar sekolah, bisa juga digunakan untuk kartu trasnportasi, sebagai syarat mutlak penerima KIP, dan berbagai pengurusan administrasi lainnya, dan sebagai upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kriminal terhadap anak seperti perdagangan anak dan masih banyak manfaat lainnya.

Sebagai mana yang telah pemerintah dalam rangka perwujudan partisipasi pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, maka pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan bahwa dalam pembuatan KIA tidak dipungut biaya apapun yang artinya gratis, namun nyatanya meskipun gratis masih saja banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan kepengurusan KIA contohnya pada Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ini adalah salah satu contoh kecamatan dengan persentase Kecamatan yang memiliki KIA paling rendah atau sedikit, sehingga harus di teliti dan ditelaah lebih dalam apa yang menjadi penyebab tersebut yang kemudian harus dicarikan solusi alternatif yang terbaik agar masalah ini tidak berlarut-larut.

Tabel 1.1
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Semester I Tahun 2024

KECAMATAN	WAJIB KIA			KEPEMILIKAN KIA		%
	L	P	JUMLAH	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	
JUAI	2.522	2.317	4.839	3.136	1.703	64,81
HALONG	3.038	2.872	5.910	3.784	2.126	64,03
AWAYAN	2.125	1.953	4.078	2.691	1.387	65,99
BATU MANDI	2.805	2.594	5.399	3.914	1.485	72,49
LAMPIHONG	2.924	2.497	5.421	3.781	1.640	69,75

PARINGIN	2.952	2.797	5.749	4.191	1.558	72,90
PARINGIN SELATAN	2.564	2.343	4.907	3.710	1.197	75,61
TEBING TINGGI	1.074	1.052	2.126	1.578	548	74,22
TOTAL	20.004	18.425	38.429	26.785	11.644	69,70

Dari tabel 1.1 di atas yang mana dalam penerapan wajib KIA pada semester I tahun 2024 kepemilikan KIA paling rendah berada di Kecamatan Halong, dengan yang sudah memiliki sebanyak 3.784 dan yang belum memiliki sebanyak 2.126 dalam presentase kepemilikan hanya 64,03% sedangkan target tujuan harus 75% pada tahun 2024. Pada Kecamatan Halong terdapat 10 Desa terendah dalam kepemilikan KIA yaitu, Desa Marajai dengan presentase kepemilikan 29,41%, Desa Mamantang dengan presentase kepemilikan 40,49%, Desa Suryatama dengan presentase kepemilikan 44,3%, Desa Mamigang dengan presentase kepemilikan 47,34%, Desa Binjai Punggal dengan presentase kepemilikan 50%, Desa Uren dengan presentase kepemilikan 50,93%, Desa Sumber Agung dengan presentase kepemilikan 53,54%, Desa Liyu dengan presentase kepemilikan 59,38%, Desa Binuang Santang dengan presentase kepemilikan 61,98%, Desa Halong dengan presentase kepemilikan 62,72%. Dari persentase ini kita bisa menilai bahwa program KIA yang ada khususnya di Kecamatan Halong masih tidak maksimal dan menarik untuk dikaji lebih dalam lagi.

Dari penemuan awal atau observasi yang dilakukan terjadi permasalahan berkaitan dengan Implementasi KIA ada beberapa fenomena masalah yang melatarbelakanginya diantaranya adalah :

1. Kurangnya fasilitas yang memadai seperti hanya terdapat 1 komputer dan 1 printer dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pembuatan KIA.
2. Kurangnya sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang program KIA terkait dengan manfaat dan pentingnya KIA. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat mungkin tidak menyadari keberadaan program KIA atau tidak memahami proses yang harus dilalui untuk mendapatkan KIA.
3. Tingkat pemahaman masyarakat terkait manfaat, prosedur, dan pentingnya KIA masih rendah dikarenakan informasi yang masih kurang. Tanpa informasi yang memadai masyarakat juga tidak dapat memahami proses yang harus dilalui dalam mengurus KIA.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Kecamatan Halong)”***.

METODE

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani KM 4 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, kode pos 71618.

Penulis melakukan penelitian dengan tipe kualitatif dengan metode deskriptif agar memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas terkait penelitian. Menurut (Sahir 2021:6) Metode penelitian kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Terkait teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah

observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Data yang digunakan yaitu data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan informan sebanyak 14 orang. Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan analisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji Kreadibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Kecamatan Halong)

1. Komunikasi

Implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) memerlukan aspek komunikasi yang akan menunjang kebijakan tentang program tersebut. Segala keputusan dan kebijakan tentang program Kartu Identitas Anak (KIA) ini harus dikomunikasikan dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat.

a. Transmisi

Terkait transmisi penyaluran komunikasi pelaksanaan program Kartu Identitas Anak ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat masih banyak masyarakat yang belum menerima sosialisasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA).

b. Kejelasan

Terkait kejelasan dalam hal kejelasan informasi program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Kecamatan Halong belum cukup baik terlihat dari beberapa masyarakat yang masih tidak mengetahui manfaat dan persyaratan Kartu Identitas Anak (KIA) namun juga sudah ada yang mengetahuinya.

c. Konsisten

Untuk indikator konsistensi petugas dalam Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) masih belum merata ke semua masyarakat dilihat hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang Kartu Identitas Anak dan sebagian tidak.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya yang baik, Kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk menunjang pelaksanaan suatu kebijakan.

a. Staf

Indikator Staf atau Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sudah cukup dan memadai dilihat dari petugas dapat menangani dengan baik.

b. Informasi

Terkait informasi dalam hal ini informasi sudah bisa dikatakan kurang baik terlihat dari pemahaman masyarakat tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih kurang dan masih ada beberapa masyarakat yang tidak menerima informasi tersebut.

c. Wewenang

Untuk wewenang petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang diturunkan untuk menangani pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) ini sudah diberikan wewenang penuh dan sudah menjalankan wewenangnya dengan baik.

d. Fasilitas

Untuk sarana prasarana atau fasilitas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) belum cukup memadai untuk melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) karena masih ada fasilitas atau alat yang rusak.

3. Disposisi

Disposition atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

a. Sikap Para Pelaksana

Terkait sikap para pelaksana dalam Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) sudah didukung dan diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan masyarakat pun menerima kebijakan ini dan menyetujui dengan adanya Kartu Identitas Anak ini.

b. Insentif

Mengenai insentif petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam Implementasi Program Kartu Identitas Anak ini tidak ada menambah keuntungan atau biaya kepada masyarakat yang melakukan pelayanan, semua tanpa di pungut biaya.

4. Struktur Birokrasi

Yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

a. Koordinasi Antar Pelaksana

Dalam koordinasi antar pelaksana dapat dikatakan baik karena masyarakat mengetahui atau mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui pihak ke-3 atau instansi yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan walaupun masih ada masyarakat yang tidak mendapat informasi tentang KIA.

b. SOP

Terkait standar operasional prosedur setiap pelaksanaan dari program Kartu Identitas Anak (KIA) ini selalu dilaksanakan dengan prosedur yang ada dalam kata lain Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sudah melakukan tugas sesuai dengan SOP dan mereka pun memahami tugas mereka dengan baik.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Kecamatan Halong)

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Sosialisasi

Dalam hal ini kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor penghambat, sosialisasi pelaksanaan program Kartu Identitas Anak yang ada di Kecamatan Halong belum terlaksana dengan baik karena kurangnya sosialisasi salah satu penyebabnya adalah tidak adanya anggaran.

b. Informasi yang masih kurang

Dalam hal ini kurangnya informasi menjadi salah satu faktor penghambat, informasi dikatakan kurang baik terlihat dari pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan masih ada beberapa masyarakat yang tidak menerima informasi tersebut.

c. Fasilitas yang masih kurang memadai

Dalam hal ini kurangnya fasilitas menjadi salah satu faktor penghambat, fasilitas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan belum cukup dan memadai untuk melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) karena masih ada fasilitas atau alat yang rusak.

2. Faktor Pendukung

a. Staf

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diketahui bahwa jumlah staf pelayanan pembuatan KIA berjumlah 5 orang, yang mana 1 orang bertanggung jawab untuk mencetak KIA dan pelayanan online dan sisanya sebagai petugas cadangan. Staf atau Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sudah cukup, memadai dan berkompeten dilihat dari petugas dapat menangani dengan baik.

b. Insentif

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Kecamatan Halong), mengenai insentif petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan khususnya dalam pelayanan Kartu Identitas Anak tidak ada memungut biaya, semua pelayanan gratis.

d. Koordinasi Antar Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Kecamatan Halong), dalam koordinasi antar pelaksana dapat memberi kemudahan untuk masyarakat yang ingin mengurus Kartu Identitas Anak karena sudah bisa melalui perantara selain itu juga dengan bekerjasama dengan stakeholder masyarakat dapat merasakan manfaat dari Kartu Identitas Anak tersebut..

e. SOP

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan Implementasi Program Kartu Identitas (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Kecamatan Halong), setiap pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) ini petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sudah melakukan tugas sesuai dengan SOP yang ditentukan.

SIMPULAN

Uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat peneliti tarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut : Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Kecamatan Halong) sudah cukup baik. Berdasarkan teori menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2017:136) dapat dilihat dari indikator. *Pertama*, indikator transmisi atau penyaluran komunikasi pelaksanaan program Kartu Identitas Anak ini masih belum berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang belum menerima sosialisasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). *Kedua*, indikator kejelasan belum cukup baik terlihat dari beberapa masyarakat yang masih tidak mengetahuinya manfaat dan persyaratan Kartu Identitas Anak (KIA). *Ketiga*, indikator konsisten petugas dalam Implementasi Program Kartu Identitas Anak masih belum merata ke semua masyarakat dilihat hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang Kartu Identitas Anak. *Keempat*, staf atau sumber daya manusia sudah cukup dan memadai dilihat dari petugas dapat menangani dengan baik. *Kelima*, indikator informasi masih kurang baik karena tidak tersampaikan ke semua masyarakat. *Keenam*, indikator wewenang petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sudah diberikan wewenang penuh dan sudah menjalankan wewenangnya dengan baik. *Ketujuh*, indikator fasilitas belum cukup memadai karena masih ada fasilitas atau alat yang rusak. *Kedelapan*, indikator sikap para pelaksana sudah didukung dan diterima oleh Dinas terkait. *Kesembilan*, indikator insentif petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tidak ada menambah keuntungan atau biaya kepada masyarakat, pelayanan dilakukan secara gratis. *Kesepuluh*, indikator koordinasi antar pelaksana dapat dikatakan baik karena masyarakat mengetahui atau mendapatkan Kartu Identitas Anak melalui pihak ke 3 yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. *Kesebelas*, indikator SOP pada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sudah melakukan tugas sesuai dengan SOP dan mereka pun memahami tugas mereka dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Kecamatan Halong) yaitu ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat adalah masalah jaringan dan kurangnya sosialisasi. Sedangkan faktor pendukung adalah staf yang cukup, fasilitas yang memadai, pelayanan yang gratis, koordinasi antar pelaksana cukup baik, dan pelayanan yang sesuai SOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuzhri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
Affrian Reno.2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.

- Agus Subianto. 2012. *Kebijakan Publik*. Vol. 7. Media Dist. Surabaya.
- Anonymous, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- Awan & Yudi. 2016. *Buku - Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) ‘EEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG’, *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Arpandi, A. (2024) ‘EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.
- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) ‘EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.
- Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) ‘EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.
- Budiman, A. and Souvia, B. (2023) ‘IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI’IYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.
- Halishah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) ‘Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Hasbiyah, S. (2022) ‘IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU’, *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) ‘IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) ‘PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) ‘Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) ‘PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) ‘PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG’, *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM

KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Helmi. 2020. *Implementasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Kamal, Alamsyah. 2016. *Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi*. Media Citr. Bandung.

Krisnawati. et al. 2019. *Implemetasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin*. Banjarmasin.

Leo Agustino. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Muhammad Maulidi, 2022. *Implementasi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Lampihong Kanan Dan Desa Lampihong Kiri)*. Skripsi. Program Studi Admininstrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Aminstrasi (STIA) Amuntai.

Nasution, Evi. 2024. *Metodologi Penelitian*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Rizqiya Anindia, et al. 2023. “Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Studi Kasus Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.”

Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.

Sahya Anggara. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Se. Bandung.

Sahya Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Se. Bandung..

Sugiyono.2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek: Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. Dwiputra P. Sidoarjo.

Syaputri, Zainal Abidin. 2023. “*Implementasi Tentang Ketentuan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Banda Aceh.*” 7(2):153–60.